

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak diterapkannya konsep otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memperoleh peluang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi daerah agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sekarang ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka menggali pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi sumber penerimaan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Anggaran pendapatan daerah bersumber dari PAD dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-

sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan undang-undang no 32 tahun 2004, salah satu pendapatan daerah yang potensial

adalah retribusi parkir. Retribusi ini dianggap potensial karena lahan parkir di wilayah kota Bandung jumlahnya relatif banyak dan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung sebagai objek retribusi parkir menjadikan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial untuk dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pengelolaan perparkiran di bahu jalan (*on street*) kota Bandung menjadi kewenangan unit pelaksana teknis pengelola perparkiran dinas perhubungan kota Bandung. Tugas pokok unit pelaksana teknis pengelola perparkiran yaitu melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan peraturan daerah kota Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas di lingkungan kota Bandung. Pihak unit pelaksana teknis pengelola perparkiran mengelola perparkiran serta menarik jasa retribusi parkir saja, tetapi tidak termasuk pemungutan hasil pajak parkir *off street* yang menjadi kewenangan dinas pelayanan pajak kota Bandung.

Adapun kawasan perparkiran di kota Bandung pada saat ini terbagi menjadi 7 wilayah yang tersebar di seluruh kota Bandung antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kawasan Perparkiran kota Bandung

No.	Wilayah
1	Cibeunying Barat
2	Cibeunying Timur
3	Pasar
4	Karees
5	Bojonegara
6	Tegallega
7	Ujung Berung dan Gede Bage

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Bandung

Tabel 1.2
Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	366.201.498.404	361.106.964.143	98.61%
2010	416.051.806.357	440.331.559.083	105.83%
2011	719.575.563.243	803.663.585.485	111.68%
2012	934.809.515.372	1.001.806.364.114	107.16%
2013	1.407.759.106.133	1.442.867.227.548	102.49%

Sumber : Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Tabel 1.3

Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2009	4.500.000.000	4.503.206.000	100.07%
2010	4.800.000.000	4.553.160.000	94.85%
2011	5.800.000.000	4.827.487.000	83.23%
2012	6.800.000.000	4.903.047.000	72.1%
2013	6.800.000.000	5.472.488.500	80.48%

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Bandung

Dari data tabel 1.2 dan tabel 1.3 yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir, salah satunya dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dijarapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang dialami dalam retribusi parkir di kota Bandung ini adalah tidak tercapainya target oleh realisasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Maka dari itu, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam pemungutan retribusi parkir sebagai berikut :

1. Faktor Teknis :

- a. Posisi Parkir : semakin besar sudut parkir, maka jumlah mobil yang dapat ditampung akan semakin banyak. Sebaliknya, jika sudut parkir semakin kecil maka jumlah mobil yang dapat ditampung semakin kecil. Sudut parkir tidak berpengaruh terhadap jumlah motor yang dapat ditampung, jumlah motor dipengaruhi oleh luas area parkir.
- b. Cuaca buruk : bila hujan kebanyakan orang malas untuk parkir di badan jalan dan lebih memilih untuk parkir di dalam gedung. Keadaan yang sama terjadi jika banjir. Tidak akan ada kegiatan parkir.
- c. Kunjungan Kenegaraan : bila ada kunjungan kenegaraan/tamu Negara, maka daerah tertentu disterilkan sehingga tidak ada kegiatan parkir.

2. Faktor Nonteknis :

- a. Parkir Liar : adanya kegiatan parkir di tempat yang seharusnya tidak ada kegiatan parkir.
- b. Pengawasan pemungutan retribusi parkir : pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi merupakan hal yang penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan petugas di lapangan.
- c. Juru parkir liar : adanya juru parkir liar yang tidak melakukan penyetoran retribusi parkir.

- d. Kurangnya pengendalian dari Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Bandung terhadap kinerja pegawai di lapangan dan proses pemungutan retribusi parkir di lapangan.
- e. Kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis parkir kota bandung. Rapat evaluasi ini seharusnya dilakukan setiap bulan, namun berdasarkan wawancara dengan pegawai unit pelaksana teknis parkir, rapat hanya dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam proses pemungutan retribusi parkir.
- f. Kurangnya sanksi berupa teguran secara langsung atau peringatan tegas terhadap pegawainya yang melakukan kesalahan dalam pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh retribusi parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kota Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung.

2. Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.

3. Instansi Terkait

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atas pemungutan retribusi parkir di kota Bandung

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perparkiran Kota Bandung yang beralamat di Jl. Babatan no. 4 Bandung dan Dinas Pelayanan Pajak yang beralamat di Jl. Wastukencana no. 2 Bandung, dimana data diperoleh dari Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2014 sampai dengan selesai.